

**Nama : Dinda Purnama**

**NPM : 2213031050**

**Kelas : B**

## **STUDI KASUS PERTEMUAN 9 EKONOMI INDUSTRI**

---

Indonesia sedang menghadapi tantangan deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun meskipun pendapatan per kapita belum mencapai level negara maju. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan *Making Indonesia 4.0* sebagai upaya revitalisasi industri nasional, dengan fokus pada lima sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.

Namun, setelah lima tahun implementasi, pertumbuhan sektor-sektor tersebut belum signifikan. Sementara itu, negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh justru menunjukkan peningkatan pesat dalam sektor manufakturnya.

### **Pertanyaan:**

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan *Making Indonesia 4.0* dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.

Jawaban:

Kegagalan implementasi *Making Indonesia 4.0* dapat dipahami melalui teori kebijakan industri yang menekankan pentingnya kesiapan ekosistem, koordinasi institusi, serta insentif ekonomi yang tepat. Sejak diluncurkan, MI4.0 mengusung agenda modernisasi teknologi dan digitalisasi produksi pada lima sektor prioritas. Namun, inisiatif tersebut belum diterjemahkan menjadi perubahan nyata karena sebagian besar industri masih menghadapi hambatan mendasar yang tidak terselesaikan, seperti tingginya biaya logistik, ketergantungan impor bahan baku, ketidakpastian regulasi, serta keterbatasan tenaga kerja terampil. Dalam kerangka teori *selective intervention* dan *market failure*, kebijakan industri harus mampu mengurangi risiko investasi dan menyediakan insentif yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas. MI4.0 justru lebih berfungsi sebagai roadmap makro daripada instrumen intervensi konkret, sehingga pelaku industri terutama skala menengah dan kecil tidak melihat manfaat langsung dari adopsi teknologi 4.0 yang membutuhkan biaya besar. Selain itu, koordinasi antar

kementerian dan pemerintah daerah yang lemah membuat implementasi MI4.0 berjalan tidak konsisten dan kehilangan fokus. Akhirnya, kondisi struktural tersebut membuat transformasi teknologi tidak mampu mendorong pertumbuhan signifikan pada sektor prioritas yang ditargetkan.

2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?

Jawaban:

Jika dibandingkan dengan Vietnam dan Korea Selatan, pendekatan kebijakan industri Indonesia terlihat kurang terarah dan kurang realistis terhadap kondisi aktual di lapangan. Vietnam berhasil menarik investasi asing besar-besaran karena menyediakan kawasan industri yang siap beroperasi, biaya produksi yang kompetitif, serta prosedur investasi yang cepat dan stabil. Integrasi Vietnam ke dalam rantai pasok global didukung pemerintah melalui fasilitas fiskal yang jelas dan komitmen infrastruktur yang konsisten. Sementara itu, Korea Selatan membangun industrinya melalui intervensi negara yang selektif dan berfokus pada pembinaan teknologi domestik, penguatan rantai pasok lokal, serta insentif yang diberikan hanya pada sektor yang menunjukkan kinerja ekspor dan inovasi. Kedua negara menempatkan pemerintah sebagai fasilitator aktif yang bukan hanya memberikan visi, tetapi juga menyediakan instrumen konkret seperti kredit murah, jaminan investasi, infrastruktur industri, dan target kinerja yang harus dipenuhi perusahaan. Berbeda dengan itu, Indonesia lebih mengutamakan pendekatan normatif melalui blueprint teknologi namun belum menyelesaikan hambatan struktural yang menjadi faktor utama lesunya industri. Ketidaksiapan infrastruktur, birokrasi yang panjang, serta insentif yang tidak terikat pada kinerja membuat kebijakan MI4.0 sulit menghasilkan dampak sebesar Vietnam atau Korea Selatan.

3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Jawaban:

Kebijakan industri alternatif yang lebih sesuai konteks Indonesia perlu menggabungkan pemulihan daya saing manufaktur dasar dengan transformasi teknologi yang bertahap dan terarah. Pemerintah harus memulai dengan memperbaiki ekosistem industri melalui pembangunan kawasan industri yang benar-benar siap pakai, peningkatan kualitas logistik dan energi, serta penyelarasan regulasi pusat dan daerah agar proses investasi menjadi lebih sederhana dan pasti. Setelah hambatan dasar teratasi, modernisasi teknologi dapat difokuskan secara selektif pada perusahaan dan sektor yang paling siap melalui pemberian dukungan pembiayaan, pelatihan SDM, dan pendampingan digitalisasi. Untuk memastikan efektivitasnya, seluruh insentif harus dikaitkan dengan kinerja seperti peningkatan produktivitas, nilai tambah domestik, dan ekspor. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat rantai pasok domestik dengan memfasilitasi kemitraan antara perusahaan besar dan pemasok lokal, serta meningkatkan kapasitas riset dan inovasi melalui kolaborasi industri–universitas. Dengan pendekatan yang lebih pragmatis, terukur, dan berbasis kinerja tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari jebakan deindustrialisasi dini dan membangun struktur industri yang lebih tangguh serta kompetitif di tingkat global.